

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara luas memiliki beberapa pengertian, namun secara umum koperasi memiliki pengertian yang sama yaitu suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 koperasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 koperasi adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dengan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Jenis Koperasi

Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan koperasi seringkali dibedakan menjadi lima jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran.

1) Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya untuk simpan pinjam. Sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan usaha dari koperasi simpan pinjam dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggotanya dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggotanya (KSP CUHK, 2021).

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi selaku produsen melakukan kegiatan dalam pengolahan bahan baku menjadi suatu barang jadi yang akan diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan (KSP CUHK, 2021).

4) Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang dibentuk dengan maksud untuk pengadaan jasa. Koperasi jasa dibedakan menjadi koperasi produsen jasa dan koperasi pemasaran jasa (KSP CUHK, 2021).

5) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang dibentuk dalam rangka membantu anggota dalam memasarkan barang yang ditawarkan oleh anggotanya (KSP CUHK, 2021).

2.1.3 Landasan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Koperasi memiliki tiga landasan. Landasan yang pertama adalah landasan idiil koperasi Indonesia yang berupa Pancasila. Landasan yang kedua adalah landasan struktural yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang disertai landasan geraknya yaitu pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan mental yang didasarkan atas kesetiakawanan dan kesadaran pribadi.

2.1.4 Fungsi Koperasi

Terdapat empat fungsi utama dari koperasi jika berkaca kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4 yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki asas kekeluargaan yang menjadi ciri khas pembeda dengan badan usaha lainnya. Selain itu koperasi juga memiliki ciri khas berupa prinsip-prinsip yang membedakannya dengan badan usaha lainnya yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian.

2.1.6 Peran dan Tujuan Koperasi

Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota koperasi memiliki peranan serta tugas untuk:

- 1) Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
- 2) Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- 3) Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2016). Suatu sistem informasi dibuat dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan informasi serta untuk mengevaluasi sumber daya, aktivitas dan kinerja. Selain itu sistem informasi dapat memberikan pengendalian yang memadai dan meningkatkan keakuratan dalam melakukan pengambilan keputusan. Menurut Romney & Steinbart (2016) sistem informasi yang baik memiliki beberapa komponen yang meliputi:

- 1) Orang yang menggunakan system;
- 2) Prosedur dan instruksi dalam pengelolaan data;
- 3) Data terkait aktivitas bisnis dan organisasi;
- 4) *Software* atau perangkat lunak yang dikenakan dalam pengelolaan data;
- 5) Infrastruktur teknologi informasi;
- 6) Pengendalian internal dan keamanan dalam pengelolaan data.

2.2.2 Siklus Pendapatan

Sistem informasi akuntansi pada suatu kegiatan usaha pada umumnya terdapat beberapa siklus yang meliputi siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Berdasarkan PSAK Nomor 23 pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode apabila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Siklus pendapatan sendiri merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait penerimaan yang terus-menerus dengan menyediakan barang atau jasa kepada penerima layanan dengan menerima kas sebagai pembayaran atas pertukaran tersebut (Romney & Steinbart, 2016). Menurut Romney dan Steinbart (2016) aktivitas bisnis pada siklus pendapatan meliputi beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan pesanan

Penerimaan pesanan merupakan aktivitas pencatatan data pesanan pelanggan dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Data pesanan pelanggan akan dimasukkan ke sistem oleh pegawai. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi perusahaan seringkali memanfaatkan perkembangan tersebut untuk dapat membuat pelanggan memasukkan data sendiri. Aktivitas penerimaan pesanan mencakup pengambilan pesanan, persetujuan kredit, pengecekan kediaan barang, dan pemrosesan permintaan pelanggan.

2) Pengiriman

Pengiriman barang merupakan aktivitas penyerahan atau pengiriman barang

kepada pelanggan sesuai dengan pesanan. Aktivitas pengiriman mencakup pengemasan pesanan dan pengiriman barang.

3) Penagihan

Aktivitas penagihan memerlukan informasi berupa data pesanan penjualan dan rincian aktivitas pengiriman dari bagian pengiriman yang bertugas mengidentifikasi kuantitas, harga, dan syarat penjualan khusus terkait barang yang dikirim. Aktivitas penagihan mencakup penagihan faktur dan pemeliharaan piutang.

4) Penerimaan kas

Penerimaan kas merupakan bagian terakhir dari rangkaian aktivitas siklus pendapatan. Pada proses penerimaan kas perusahaan akan mengeluarkan dua faktur pembayaran. Faktur pertama akan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran dan faktur kedua akan digunakan sebagai bukti arsip oleh bagian piutang. Selain itu uang penerimaan pembayaran dari pelanggan akan langsung diserahkan kepada bagian kasir.

Siklus pendapatan memiliki tujuan utama dalam memudahkan pertukaran produk atau jasa dengan pengguna produk atau jasa untuk memperoleh uang tunai. Selain itu berdasarkan Kumpulan ArtikelKu (2016) siklus pendapatan memiliki tujuan khusus yaitu:

- 1) Mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat;
- 2) Memverifikasi kelayakan kredit konsumen;
- 3) Memberikan barang atau jasa dengan waktu dan cara yang tepat;
- 4) Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat;

- 5) Membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen dengan tepat;
- 6) Mengamankan kas sampai dilakukan penyetoran barang.

Fungsi siklus pendapatan menurut Kumpulan ArtikelKu (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pesanan;
- 2) Mencatat dan memproses data aktivitas pengadaan barang atau jasa;
- 3) Menyiapkan barang atau jasa yang dijual kepada pembeli;
- 4) Menyelenggarakan catatan piutang;
- 5) Memindahbukukan transaksi ke buku besar;
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan lainnya yang diperlukan.

2.2.3 Dokumen Siklus Pendapatan

Dokumen merupakan suatu alat yang tidak bisa lepas dari berbagai macam kegiatan terutama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Terdapat berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam siklus pendapatan. Dokumen diharapkan dapat membantu manajemen dalam melakukan kontrol dan meminimalisir adanya kesalahan. Menurut Nawangsari dan Putra (2016) terdapat beberapa dokumen yang diperlukan dalam koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

- 1) Formulir permohonan kredit;
- 2) Surat perjanjian hutang piutang;
- 3) Nota kredit;
- 4) Kartu angsuran;

- 5) Slip simpanan anggota;
- 6) Laporan hasil survey dan analisa kredit.

2.2.4 Ancaman dan Hambatan

Menurut Romney dan Steinbart (2016) bentuk ancaman terhadap sistem informasi akuntansi berbasis komputer dapat dibedakan menjadi empat penyebab utama yaitu berupa bencana alam dan politik, kegagalan *software* maupun *hardware*, tindakan yang tidak disengaja, dan tindakan yang disengaja. Sedangkan ancaman untuk siklus pendapatan sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Data induk yang tidak akurat atau tidak valid;
- 2) Kegagalan untuk menagih;
- 3) Kelebihan atau kekurangan persediaan;
- 4) Memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid;
- 5) Kesalahan posting oleh bagian akuntansi;
- 6) Pencurian kas;
- 7) Masalah arus kas;
- 8) Kehilangan atau kerusakan data induk;
- 9) Kinerja buruk.

2.2.5 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mathis dan Jackson (2008, dikutip dalam Binus University, 2020) pengendalian adalah kegiatan pemantauan kemajuan suatu organisasi atau unit kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan kemudian mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan untuk pengendalian internal sendiri menurut Romney dan Steinbart (2016) merupakan

proses dan prosedur yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi.

Pengendalian internal dibedakan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (Romney & Steinbart, 2016).

- 1) Pengendalian umum atau *general control* merupakan pengendalian yang digunakan untuk memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi dalam keadaan stabil dan dikelola dengan baik.
- 2) Pengendalian aplikasi atau *application control* merupakan pengendalian yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi kesalahan pada transaksi serta ancaman penipuan di dalam program aplikasi.

Menurut Romney dan Steinbart (2016) pengendalian internal memegang tiga fungsi penting sebagai berikut:

- 1) Pengendalian preventif atau *preventive control* merupakan pengendalian yang digunakan untuk mencegah permasalahan sebelum timbulnya suatu permasalahan. Pengendalian preventif yang dapat dilakukan oleh koperasi tercermin dalam kegiatan seleksi kualifikasi penerimaan anggota dan pengurus koperasi.
- 2) Pengendalian detektif atau *detective control* merupakan pengendalian dengan menemukan masalah yang tidak bisa dihindari. Dalam kegiatan usaha pengendalian detektif ini dapat diterapkan ketika melakukan pembuatan rekonsiliasi bank karena perbedaan jumlah saldo antara yang tercatat pada bank dan perusahaan seringkali tidak sama karena adanya perbedaan informasi dan waktu pengakuan kas masuk maupun keluar.

- 3) Pengendalian korektif atau *corrective control* merupakan pengendalian yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta memperbaiki permasalahan dari kesalahan yang ditimbulkan. Pengendalian korektif dapat diterapkan seperti ketika pembuatan jurnal koreksi atas kesalahan pembuatan penjurnalan transaksi awal.

Committee of Sponsoring Organizations-Internal Integrated Framework (COSO-ICIF) berpendapat bahwa pengendalian internal merupakan proses kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Menurut COSO terdapat lima komponen dasar dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian pengawasan.

- 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian internal yang baik akan menciptakan suasana kerja yang disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian sebagai komponen dasar dalam mewujudkan pengendalian yang efektif dan efisien mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi harus menunjukkan integritas dan nilai-nilai etika.
- b. Dewan direksi harus independen dalam mengawasi kinerja manajemen.
- c. Kinerja manajemen yang diawasi oleh dewan direksi harus menunjukkan performa yang baik dalam melaksanakan kendali perusahaan.

- d. Perusahaan atau organisasi menunjukkan komitmen pengembangan individu di dalam perusahaan.
- e. Organisasi meyakinkan terhadap masing-masing individu bahwa tanggung jawab atas tugas merupakan salah satu cara dalam pengendalian internal.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap perusahaan. Manajemen dapat menanggapi risiko dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Menerima kemungkinan dan dampak risiko dengan maksud untuk meminimalisir dampak dari risiko melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien
- b. Membagi atau memindahkan risiko kepada pihak lain dengan melakukan pembelian asuransi
- c. Menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang memiliki atau menimbulkan risiko.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, tindakan ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian merupakan tanggung jawab bagi pengurus dalam upaya memastikan transaksi, pengarsipan dokumen, dan penatausahaan aset telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Aktivitas pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti sebagai berikut:

- a. Pemisahan atau pembagian tugas yang jelas
- b. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan kegiatan operasional

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan suatu informasi yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian internal perusahaan. Informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena merupakan sarana utama perusahaan dalam melakukan analisis risiko.

5) Pengendalian Pengawasan

Pengendalian pengawasan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh organisasi dalam pengawasan secara optimal untuk aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan dalam menjalankan kinerja dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya pengendalian pengawasan manajemen atau pengurus dapat menganalisa tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan maupun meminimalisir adanya risiko dan kerugian. Pengendalian pengawasan yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan audit oleh auditor internal maupun eksternal perusahaan.